

*This thesis discusses about the urgency of Indonesia in maintaining the implementation of its local content policy (TKDN) in 4G/LTE sector from potential trade disputes within the WTO. By using neomercantilism perspective, this thesis attempts to analyze the interests contained in the TKDN 4G/LTE policy, so that the government has the urgency to maintain its implementation. The TKDN 4G/LTE policy is a government project in overcoming the domestic smartphone market which has some negative impacts on Indonesian economy. However, the issue of TKDN 4G/LTE has invited some attention from member countries and has been a long-standing issue in the TRIMs Committee's forum since 2015 until now. Moreover, Indonesia has faced some pressures to immediately remove those policy that is considered discriminatory, so that it doesn't rule out the possibility to be disputed in the Dispute Settlement Body of the WTO. As for Indonesia, the implementation of the TKDN 4G/LTE policy contains some interests that want to be realized soon, especially in the era of President Joko Widodo's Government. This research shows that there are four main interests being run by the government, that are the interest to protect the domestic smartphone market, import substitution industrialization strategies, to develop infrastructure in the smartphone sector, and to improve local human resource capabilities.*

*Keywords: neomercantilism, TKDN 4G/LTE policy, Indonesia's national interest, TRIMs WTO*

Skripsi ini membahas mengenai urgensi Indonesia dalam mempertahankan implementasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor 4G/LTE dari potensi sengketa dagang dalam WTO. Dengan menggunakan perspektif neomerkantilisme, skripsi ini mencoba untuk menganalisis kepentingan yang terkandung dalam kebijakan TKDN 4G/LTE sehingga pemerintah memiliki urgensi untuk mempertahankan implementasinya. Kebijakan TKDN 4G/LTE merupakan proyek pemerintah dalam mengatasi kondisi pasar ponsel domestik yang justru memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Namun, isu TKDN 4G/LTE ini justru mengundang *concern* dari negara anggota dan bahkan menjadi *long-standing issue* dalam sidang Komite TRIMs sejak tahun 2015 hingga saat ini. Terlebih lagi, Indonesia telah menghadapi desakan untuk segera menghapus kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan isu TKDN 4G/LTE akan disengketakan dalam badan penyelesaian sengketa (DSB) WTO. Sedangkan bagi Indonesia, implementasi kebijakan TKDN 4G/LTE mengandung kepentingan mendesak yang ingin segera diwujudkan, khususnya di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kepentingan utama yang sedang dijalankan pemerintah, yakni kepentingan untuk memproteksi pasar ponsel domestik, strategi industrialisasi substitusi impor, upaya pengembangan infrastruktur di sektor ponsel, dan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia lokal.

Kata kunci: neomerkantilisme, kebijakan TKDN 4G/LTE, kepentingan nasional Indonesia, TRIMs WTO